

Pointer pertemuan dengan Bathin Sembilan di Simpang Macan Luar, 12 Desember 2012

Peserta: LSM pendamping (CAPP, Setara, Perkumpulan Hijau, Agra) dan Kemas HH (Yulius, Budi aulia, Yudha, Hery dan Eka) difasilitasi oleh Burung Indonesia (Mangara, Fahrul, dan Dwiati Novita Rini), Sekitar 50 orang Batin Sembilan.

Tempat: Rumah Bapak Komerling Ketua RT

Waktu: jam 15.00-17.00

1. Masyarakat Bathin Sembilan menyampaikan keluhannya:

- a. Berbagai sikap/perilaku manajemen HH tidak berkenan bagi masyarakat setempat dan tidak menunjukkan budaya ketimuran dan seperti lebih buruk daripada jaman penjajahan.
- b. Masyarakat Bathin Sembilan merasa sebagai penduduk asli yang sudah tinggal sejak nenek moyang tetapi sejak adanya REKI merasakan banyak kejanggalan mendapat banyak larangan sehingga tidak dapat lagi melakukan kegiatan yang sudah dilakukan turun-temurun (misalnya berhumas). Hak-hak masyarakat adat menjadi terbatas oleh REKI.
- c. Beberapa masyarakat tidak setuju dipindahkan ke Mitra Zone karena terkait dengan tanaman yang ada dan menjaga dari serangan hama. Masyarakat merasa tidak memiliki ruang untuk mencari makan tetapi disediakan WC untuk pembuangannya. Sementara di Mitra zone dipandang tidak ada kehidupan karena tidak ada pengembangan ekonomi jangka panjang.
- d. Pemberian bantuan dan kegiatan yang dilakukan manajemen REKI tidak dikomunikasikan dan dimusyawarahkan terlebih dulu dengan sebaik-baiknya bersama masyarakat (misalnya bantuan WC, ayam, kambing, dll). Pihak manajemen lebih sering datang sudah membawa surat pernyataan dan minta tanda tangan persetujuan masyarakat.
- e. Masyarakat yang merasa tidak dapat berkomunikasi secara setara dengan REKI sehingga merasa perlu didampingi oleh 4 LSM.

2. Empat LSM pendamping (Cappa, Setara, Perkumpulan Hijau, Agra) menyampaikan keluhannya:

- a. Ada masalah berat terkait komunikasi di REKI, seharusnya REKI berbeda dari perusahaan lainnya dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan LSM. Misalnya, patroli menyalai orang yang datang dan diberi instruksi untuk melarang LSM lewat padahal LSM memiliki surat mandat dari masyarakat.
- b. REKI telah menggunakan media untuk memperburuk hubungannya dengan LSM.

c. Isi lembar surat Gubernur yang juga diteruma masyarakat Bathin Sembilan membuat masyarakat merasa diintimidasi.

3. Manajemen HH (Kemas) memberikan beberapa klarifikasi:

a. Kemas meminta maaf atas hal-hal yang tidak berkenan selama ini dan ke depan bersedia memperbaiki berbagai hal bersama-sama dengan masyarakat dan LSM pendamping.

b. Kemas menyatakan untuk memulai semua proses dari awal lagi dan meminta semua pihak untuk dapat melakukan perencanaan bersama, khususnya terkait dengan kegiatan ekonomi jangka panjang.

c. PT. REKI juga merasa gerah dengan kampanye teman-teman LSM Pendamping

4. Dari Keluhan dan interest dari masing-masing pihak, disepakati hal-hal:

a. Semua pihak bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara bersama.

b. Ada keinginan untuk bersama-sama memperbaiki kesejahteraan dan mengembangkan ekonomi jangka panjang masyarakat Batin Sembilan.

c. Masyarakat, 4 LSM pendamping dan PT. REKI akan menyelesaikan masalah konflik lahan (bisa berhumas) secara bersama-sama melalui musyawarah dan melakukan identifikasi kepemilikan tradisional Batin Sembilan hingga menuju kesepakatan

d. Ada niat baik dari semua pihak untuk memperbaiki hubungan dan komunikasi satu sama lain dan menghentikan perang opini di media.

e. PT. REKI harus membuat surat resmi bahwa instruksi gubernur tidak diberlakukan bagi masyarakat Batin Sembilan

f. PT. REKI harus menyelesaikan ganti rugi kelapa sawit warga yang diracun dan belukar yang ditanami oleh staff REKI.

5. Tindak lanjut:

a. Untuk proses selanjutnya akan tetap difasilitasi oleh Burung Indonesia, Jika staff Burung tiak bisa, maka dapat diwakilkan kepada Aidil dan Kusnul sebagai konsultan Burung Indonesia.

b. Untuk saling berkomunikasi antar pihak ditunjuk beberapa komunikator yaitu: Yunus (LSM), Komering dan Hasan Badak (Bathin Sembilan), Yulius (PT REKI) dan Mangara (Burung Indonesia)

c. Pertemuan selanjutnya akan dilakukan pada awal Januari untuk memberi waktu bagi masyarakat untuk dapat berkonsolidasi dulu sebelum pertemuan tersebut.

END